



Dinamika Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Analisis Implementasi Dan Efektivitas Kebijakan Pemulihan Ekonomi

La Ode Agus Said¹

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

The COVID-19 pandemic reshaped Indonesia's political economy framework and prompted the government to implement large-scale intervention policies through the National Economic Recovery Program (PEN). This study examines the dynamics, implementation, and effectiveness of post-pandemic recovery policies during the 2020–2025 transition period. Using a qualitative descriptive method, data were collected through literature review and policy document analysis from official government publications, academic sources, and international institutional reports. The findings demonstrate that PEN contributed to restoring macroeconomic stability, with national growth returning to approximately 5% in 2023–2024. However, policy implementation varied across regions due to administrative capacity limitations, suboptimal central–local coordination, and political dynamics influenced by the 2024 election agenda. Key challenges ahead include fiscal normalization, strengthening MSME productivity, and enhancing national economic resilience. The study concludes that improved institutional governance, policy coherence, and multi-stakeholder collaboration are essential to ensure sustainable post-pandemic economic recovery.

Keywords: Political Economy Policy, Policy Implementation, Economic Recovery, Post-COVID-19 Pandemic.

Abstrak

Pandemi COVID-19 mengubah arah kebijakan ekonomi politik Indonesia dan mendorong pemerintah menerapkan berbagai kebijakan intervensi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika implementasi dan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi pada periode 2020–2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan dari sumber resmi pemerintah, publikasi akademik, serta laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PEN berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi dengan mengembalikan pertumbuhan ke angka positif sekitar 5% pada 2023–2024. Namun, efektivitas program belum merata di seluruh daerah karena hambatan kapasitas birokrasi, koordinasi pusat–daerah yang belum optimal, serta pengaruh dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Tantangan ke depan meliputi normalisasi fiskal, peningkatan produktivitas UMKM, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola, konsistensi kebijakan, dan sinergi multipihak menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi Politik, Implementasi Kebijakan, Pemulihan Ekonomi, Pasca Pandemi COVID-19.

¹ **CONTACT:** laodeagussaid@aho.ac.id

DOI: <https://10.35724/mjpa.v8i1.7310>

1. Pendahuluan

Pasca pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi politik yang efektif. Krisis kesehatan global yang bermula pada awal 2020 telah mengubah paradigma kebijakan publik di Indonesia, memaksa pemerintah untuk merespons dengan cepat melalui berbagai instrumen kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya (Bappenas, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi signifikan mencapai -2,07% pada tahun 2020 (BPS, 2021) menuntut reformulasi kebijakan ekonomi yang komprehensif. Dalam konteks teori kebijakan publik, situasi pandemi COVID-19 dapat dipahami sebagai "focusing event" yang memaksa pemerintah untuk mengubah agenda kebijakan secara dramatis (Kingdon, 2003). Sektor-sektor utama seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata yang terpukul parah memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan (LPEM UI, 2021). Dampak ekonomi ini juga berimbas pada kondisi politik, dengan munculnya berbagai isu dan konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan (Pratama, 2021). Kebijakan pemulihan ekonomi yang diimplementasikan pemerintah mencakup berbagai dimensi, mulai dari kebijakan fiskal ekspansif, reformasi regulasi, hingga program perlindungan sosial. Namun, kompleksitas implementasi kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri. Menurut Pressman dan Wildavsky (1973), implementasi kebijakan adalah hasil dari suatu proses yang rumit serta melibatkan beragam pihak yang berperan dan dapat mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika kebijakan ekonomi politik Indonesia pasca pandemi COVID-19, khususnya dalam menganalisis gap antara formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Dengan menggunakan perspektif teori kebijakan publik, penelitian ini akan mengkaji efektivitas berbagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemulihan ekonomi dalam periode transisi 2020-2025.

2. Kerangka Teori

2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik (Anderson, 2011). Dalam konteks ekonomi politik, kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian nasional. Dye (2017) menegaskan bahwa kebijakan publik adalah "*whatever government chooses to do or not to do*", yang mencerminkan pilihan-pilihan strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan. Proses kebijakan publik menurut Anderson (2011) meliputi lima tahap: *agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation*. Setiap tahap memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks krisis seperti pandemi COVID-19 yang memerlukan respons kebijakan yang cepat dan adaptif.

2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi fase yang menentukan dalam rangkaian kebijakan publik. Pressman dan Wildavsky (1973) melalui karya klasik Implementation menegaskan bahwa implementasi merupakan rangkaian interaksi antara perumusan tujuan dengan tindakan nyata yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Mereka menekankan bahwa implementasi kebijakan seringkali menghadapi hambatan yang tidak terduga, yang mereka sebut sebagai "implementation deficit". Sabatier dan Mazmanian (2013) mengembangkan model implementasi yang menekankan pentingnya faktor-faktor kondisional dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Model mereka mengidentifikasi tiga kategori variabel yang mempengaruhi implementasi: (1) *tractability of problems*, (2) *ability of statute to structure implementation*, dan (3) *non-statutory variables affecting implementation*. Van Meter dan Van Horn (1975) mengusulkan model implementasi yang menekankan pada hubungan antara kebijakan dengan performansi implementasi. Dalam model tersebut, terdapat enam elemen yang saling berkaitan, yaitu aspek ukuran dan tujuan dari kebijakan, sumber daya tersedia, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pihak implementor, komunikasi antar lembaga terkait, serta kondisi lingkungan yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan politik.

2.3 Teori Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah bidang interdisipliner yang mempelajari interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks Indonesia, perspektif ekonomi politik menjadi penting untuk memahami bagaimana kepentingan-kepentingan politik mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan ekonomi. Caporaso dan Levine (2008) membedakan dua pendekatan utama dalam ekonomi politik: pendekatan yang berorientasi pada pasar (*market-oriented*) dan pendekatan yang berorientasi pada negara (*state-oriented*). Pendekatan yang berorientasi pada pasar menekankan pada peran mekanisme pasar dalam alokasi sumber daya, sementara pendekatan yang berorientasi pada negara menekankan pada peran aktif pemerintah dalam mengarahkan perekonomian. Dalam konteks krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19, teori Keynesian menjadi relevan dalam memahami peran pemerintah dalam intervensi ekonomi.

2.4 Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Studi tentang kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi menunjukkan bahwa pemerintah di berbagai negara menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi COVID-19. Blanchard dan Pisani-Ferry (2020) mengidentifikasi tiga kategori utama kebijakan pemulihan: kebijakan kesehatan untuk mengendalikan pandemi, kebijakan untuk melindungi ekonomi selama lockdown, dan kebijakan untuk merangsang pemulihan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemulihan ekonomi mencakup Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan pada tahun 2020 dengan total anggaran mencapai Rp 695,2 triliun. Program ini mencakup berbagai komponen seperti perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM, insentif pajak, dan penguatan sektor kesehatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi literatur untuk mengidentifikasi dinamika kebijakan ekonomi politik Indonesia setelah fase pandemi COVID-19. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi lembaga pemerintah, jurnal ilmiah, dan publikasi media massa yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang mencakup: (1) dokumen kebijakan resmi pemerintah seperti peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan presiden; (2) laporan evaluasi kebijakan dari lembaga-lembaga pemerintah; (3) publikasi akademik dari jurnal ilmiah yang membahas kebijakan ekonomi Indonesia; dan (4) laporan dari lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan OECD. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam implementasi kebijakan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Indonesia dan Respons Kebijakan

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, memaksa pemerintah untuk merespons dengan berbagai kebijakan darurat yang belum pernah ada sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07%, yang merupakan kontraksi terburuk sejak krisis ekonomi 1998. Dalam konteks teori agenda setting Kingdon (2003), pandemi COVID-19 dapat dipahami sebagai "focusing event" yang mengubah agenda kebijakan pemerintah secara dramatis. Pemerintah dipaksa untuk mengalihkan prioritas kebijakan dari agenda pembangunan jangka panjang ke respons krisis jangka pendek. Hal ini tercermin dalam peluncuran Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sektor-sektor ekonomi yang paling terdampak meliputi perdagangan, transportasi, dan pariwisata yang mengalami penurunan kinerja hingga dua digit (LPEM UI, 2021). Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga sosial, dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif.

4.2 Analisis Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Implementasi kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi Pressman dan Wildavsky (1973). Program PEN yang diluncurkan pemerintah mencakup lima kluster utama: perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif usaha, penguatan sektor kesehatan, dan dukungan untuk korporasi. Dalam konteks model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), beberapa faktor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan PEN dapat diidentifikasi: Sumber Daya: Alokasi anggaran yang besar untuk program PEN menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat. Namun, keterbatasan kapasitas administrasi di tingkat daerah menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan yang efektif. Karakteristik Agen Pelaksana: Implementasi program PEN melibatkan multiple agencies mulai dari kementerian, lembaga non-kementerian, hingga pemerintah daerah. Koordinasi antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan implementasi. Komunikasi Antar Organisasi: Tantangan komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi program PEN, terutama dalam hal sinkronisasi data dan targeting penerima bantuan.

4.3 Efektivitas Kebijakan dan Pencapaian Target Pemulihan Ekonomi

Evaluasi efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia dapat dianalisis melalui berbagai indikator kinerja. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7%, meningkat menjadi 5,3% pada tahun 2022. Memasuki periode 2023-2024, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai sekitar 5%, dengan proyeksi 2024 mencapai 5,2% (BPS, 2024), yang menunjukkan keberhasilan relatif kebijakan pemulihan. Namun, analisis mendalam menggunakan kerangka Sabatier dan Mazmanian (2013) menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor: Kompleksitas masalah ekonomi akibat pandemi yang multidimensional membuat formulasi solusi kebijakan menjadi challenging. Interdependensi antar sektor ekonomi memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik. Pemulihan sektor UMKM, misalnya, tidak hanya

membutuhkan bantuan modal tetapi juga dukungan akses pasar dan digitalisasi. Kejelasan tujuan dan target kebijakan dalam program PEN relatif baik, dengan indikator kinerja yang terukur. Namun, fleksibilitas dalam implementasi kadang menimbulkan interpretasi yang berbeda di tingkat pelaksana, terutama terkait kriteria penerima bantuan dan mekanisme penyaluran. Faktor-faktor politik, seperti dinamika hubungan pusat-daerah dan kepentingan elit politik, turut mempengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Transparansi fiskal menjadi isu krusial yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap program pemulihan ekonomi. Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas governance, termasuk mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Peningkatan transparansi melalui digitalisasi sistem bantuan sosial menunjukkan perbaikan dalam aspek governance. Sinergi antar pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Kolaborasi ini terlihat dalam program pemulihan UMKM yang melibatkan perbankan, fintech, dan platform digital.

4.4 Dinamika Politik Menjelang dan Pasca Pemilu 2024

Implementasi kebijakan pemulihan ekonomi tidak lepas dari perkembangan politik di Indonesia, terutama ketika memasuki masa Pemilihan Umum 2024. Sebagaimana dianalisis oleh Huntington (1968), transisi ekonomi dan politik yang terjadi secara simultan dapat memicu instabilitas dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia pasca pandemi, hal ini terlihat dari munculnya berbagai isu dan konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan.

Dinamika politik menjelang Pemilu 2024 memengaruhi konsistensi kebijakan pemulihan ekonomi. Terdapat kecenderungan pergeseran prioritas kebijakan dari program pemulihan jangka panjang ke program-program populis yang berorientasi jangka pendek untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini terlihat dari ekspansi program bantuan sosial dan subsidi energi yang meningkat signifikan pada tahun 2023-2024. Salah satu contoh konkret adalah perdebatan mengenai transparansi alokasi anggaran untuk penanganan pandemi antara pemerintah dan DPR. Menurut laporan Kementerian Keuangan (2021), terdapat ketegangan antara eksekutif dan legislatif terkait akuntabilitas penggunaan anggaran PEN. Hal ini mencerminkan adanya political games yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam kerangka analisis Lijphart (1999) tentang demokrasi konsensus, situasi krisis seperti pandemi memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Namun, realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa konsensus politik tidak selalu mudah dicapai, terutama dalam situasi menjelang pemilihan umum. Polarisasi politik mempengaruhi proses deliberasi kebijakan dan dapat menghambat adopsi kebijakan yang unpopuler namun necessary. Pemilu 2024, Indonesia memasuki fase transisi kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kontinuitas kebijakan pemulihan ekonomi. Tantangan utama adalah memastikan bahwa program-program yang telah berjalan dapat dilanjutkan dan disempurnakan oleh pemerintahan baru, tanpa terjadinya disruption yang signifikan.

4.5 Tantangan Normalisasi Fiskal dan Penguatan Produktivitas UMKM

Memasuki tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan krusial dalam proses normalisasi fiskal setelah periode ekspansi fiskal yang massif selama pandemi. Tantangan ini mencakup beberapa dimensi: Defisit anggaran yang membengkak selama pandemi (mencapai 6,1% dari PDB pada 2020) perlu dikembalikan ke level yang sustainable sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara maksimal 3% dari PDB. Proses konsolidasi fiskal ini memerlukan strategi yang hati-hati untuk tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah perlu melakukan gradual fiscal adjustment dengan memprioritaskan efisiensi belanja dan perluasan basis pajak. Sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia (menyumbang sekitar 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja) masih menghadapi tantangan dalam hal produktivitas. Meskipun berbagai program bantuan telah disalurkan, transformasi struktural UMKM dari usaha subsisten menjadi usaha produktif masih memerlukan intervensi yang lebih komprehensif. Program digitalisasi UMKM, akses pembiayaan yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas manajerial menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM. Indonesia menghadapi tantangan eksternal berupa ketidakpastian ekonomi global, termasuk fluktuasi harga komoditas, kebijakan moneter negara maju, dan geopolitik internasional. Penguatan ketahanan ekonomi domestik melalui diversifikasi ekspor, pengembangan industri substitusi impor, dan penguatan cadangan devisa menjadi prioritas kebijakan.

4.6 Implikasi Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan

Analisis implementasi kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas institusi dalam mendukung efektivitas kebijakan. Dalam konteks teori new institutionalism, institusi yang kuat menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan yang efektif (March & Olsen, 1989). Beberapa implikasi kebijakan yang dapat diidentifikasi meliputi: Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih secara sinergis antara otoritas pusat dan daerah dalam menerapkan program pemulihan ekonomi. Pembentukan *task force* atau badan koordinasi khusus dengan kewenangan yang jelas dapat meningkatkan efektivitas implementasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis perlu dikembangkan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Digitalisasi sistem pelaporan dan pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan. Investasi dalam capacity building birokrasi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Pelatihan SDM aparatur, modernisasi sistem administrasi, dan peningkatan remunerasi menjadi aspek penting. Digitalisasi sistem administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam implementasi kebijakan. Integrasi database

penerima bantuan, sistem perpajakan, dan layanan publik lainnya dapat mengurangi duplikasi dan meningkatkan akurasi targeting. Kebijakan pemulihan ekonomi perlu ditransformasikan menjadi strategi pembangunan ekonomi jangka panjang yang fokus pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing. Investasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan riset & pengembangan menjadi kunci untuk transformasi ekonomi yang sustainable.

5. Kesimpulan

Dinamika kebijakan ekonomi politik Indonesia pasca pandemi COVID-19 dalam periode transisi 2020-2025 menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik. Pandemi telah memaksa pemerintah untuk mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih interventionis dan ekspansif, sejalan dengan teori Keynesian tentang peran aktif pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi kembali ke level positif, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% pada periode 2023-2024. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang cepat dan terukur dapat menekan dampak krisis ekonomi dengan efektif. Namun, pencapaian ini juga diiringi oleh berbagai tantangan dalam implementasi. Keterbatasan kapasitas birokrasi di tingkat daerah dan koordinasi pusat-daerah yang belum optimal menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program pemulihan. Masalah sinkronisasi data, targeting penerima bantuan, dan disparitas kapasitas antar daerah menunjukkan perlunya penguatan sistem administrasi dan *governance*. Dinamika politik menjelang dan pasca Pemilu 2024 memengaruhi konsistensi kebijakan pemulihan ekonomi. Polarisasi politik, konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif, serta kecenderungan populisme dalam kebijakan menunjukkan kompleksitas sistem politik Indonesia yang demokratis namun masih menghadapi tantangan dalam mencapai konsensus politik. Diperlukan penguatan institusi dan mekanisme governance yang lebih efektif untuk mendukung implementasi kebijakan yang optimal. Kualitas governance, transparansi fiskal, dan sinergi aktor kebijakan terbukti menjadi determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan pemulihan ekonomi. Peningkatan transparansi melalui digitalisasi, partisipasi multipihak, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Memasuki tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan utama berupa normalisasi fiskal setelah periode ekspansi yang massif, penguatan produktivitas UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, dan penguatan ketahanan ekonomi domestik terhadap gejolak global. Keberhasilan mengatasi tantangan-tantangan ini akan menentukan *trajectory* dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada fase menengah sampai jangka panjang.

6. Daftar Pustaka

- Anderson. (2011). Public Policy Making Third Edton (Vol. 1–3). Penerbit Houghton Mifflin Company
- Bappenas. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Daerah Tahun 2020. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Blanchard, O., & Pisani-Ferry, J. (2020). Monetisation: Do not panic. VoxEU. Retrieved from <https://voxeu.org/article/monetisation-do-not-panic>
- BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- BPS. (2024). ResUME Rilis Berita Resmi Statistik Edisi 5 Februari 2024. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/news/2024/02/05/900/resume-rilis-berita-resmi-statistik-edisi-5-februari-2024.html>
- Caporaso James A, David P Levine. 2008. Theories Of Political Economy. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15th ed.). Boston: Pearson.
- Fahmi, I. (2013). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Huntington, S. P. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven and London: Yale University Press.
- Kementerian Keuangan. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
- Kingdon, J. W. (2003). Agendas, Alternatives, and Public Policies (2nd ed.). New York: Longman.
- Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press.
- LPEM UI. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. New York: Free Press.
- Mufti, M. (2013). Teori-teori Politik. Bandung: Pustaka Setia.
- Pratama, A. (2021). Dinamika politik ekonomi Indonesia di era pandemi COVID-19. Jurnal Ilmu Politik, 15(2), 45-62.
- Sabatier, M., Daniel H, dan Paul A. (2013). Implementation and Public Policy. Harper Collins.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
- World Bank. (2021). Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery. Washington, DC: World Bank Group.